

Konseptualisasi Literasi Komunikasi Sebagai Kompetensi Dasar Dalam menghadapi Ancaman Disinformasi Di Kalangan Pelajar

¹**Annida** (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau)

E-mail: annida2208@student.unri.ac.id

²**Luthfia Rahmadita Br Siregar** (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau)

E-mail: luthfia.rahmadita6827@student.unri.ac.id

³**Naila Ridya Ramadhani** (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau)

E-mail: naila.ridya4961@student.unri.ac.id

⁴**Najla Dwi Herina** (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau)

E-mail: najla.dwi4515@student.unri.ac.id

⁵**Ere Mardella Arbiani** (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau)

E-mail: ere.arbiani@lecturer.unri.ac.id

Kata Kunci: Konseptualisasi Literasi, Komunikasi, Kompetensi, Disinformasi

Keywords: *Conceptualization of Literacy, Communication, Competence, Disinformation*

Received : 3 Juli 2025

Revised : 11 Juli 2025

Accepted: 20 Juli 2025

©(2025)The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi yang pesat telah memberikan pengaruh yang besar terhadap pola komunikasi dan penyebaran informasi di kalangan pelajar. Namun, kemudahan akses informasi tersebut juga diiringi oleh meningkatnya ancaman disinformasi yang dapat memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berperilaku pelajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengonseptualisasikan literasi komunikasi sebagai kompetensi dasar yang diperlukan pelajar dalam menghadapi arus informasi yang tidak akurat di era digital. Melalui pendekatan kualitatif, kajian ini menganalisis literatur terkait literasi komunikasi, literasi digital, dan fenomena disinformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi komunikasi tidak hanya mencakup kemampuan memahami dan menyampaikan pesan secara efektif, tetapi juga melibatkan aspek kritis dalam menilai sumber, isi, serta konteks informasi. Literasi komunikasi yang kuat berperan sebagai benteng kognitif dan sosial dalam menanggulangi penyebaran disinformasi di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, integrasi literasi komunikasi dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran menjadi urgensi strategis untuk membentuk generasi pelajar yang kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang digital.

ABSTRACT

The rapid advancement of information technology has significantly reshaped communication patterns and the flow of information among students. Yet, this ease of access also comes with a growing risk of misinformation, which can influence students' ways of thinking, attitudes, and behaviors. This

study aims to conceptualize communication literacy as a fundamental competency that students need in order to navigate inaccurate information circulating in the digital era. Using a qualitative approach, the study reviews relevant literature on communication literacy, digital literacy, and the dynamics of misinformation. The findings indicate that communication literacy extends beyond the ability to understand and convey messages effectively; it also involves critical skills in evaluating the credibility, content, and context of information. Strong communication literacy functions as both a cognitive and social safeguard against the spread of misinformation in educational settings. Therefore, incorporating communication literacy into curricula and learning activities is a strategic necessity for fostering a generation of students who think critically and communicate ethically and responsibly in digital spaces.

I. PENDAHULUAN

Ancaman disinformasi saat ini merupakan tantangan serius bagi tatanan sosial, terutama di kalangan pelajar yang rentan karena rendahnya literasi digital, disinformasi yang masif saat ini menjadikan pelajar (Generasi Z) sebagai kelompok yang sangat rentan, baik sebagai korban maupun agen penyebar yang tidak sengaja. (Wamenkomdigi, 2025; Astuti & Wibowo, 2021). Era saat ini ditandai dengan penetrasi digital yang tidak terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini menjadikan literasi digital sebagai keterampilan esensial untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi secara baik. Lebih dari sekadar mengakses informasi, penggunaan teknologi digital juga berdampak signifikan pada partisipasi aktif dalam proses demokrasi, membuka platform bagi individu untuk berekspresi dan terlibat dalam diskusi publik, yang pada akhirnya memengaruhi dinamika demokrasi.

Hasil survei tersebut menyoroiti bahwa keamanan digital menjadi aspek literasi yang paling rendah dibandingkan keterampilan digital, etika digital, dan budaya digital. Kondisi ini diperburuk dengan perubahan mendalam dalam konsumsi informasi yang memicu isu-isu hukum dan etika. Salah satu isu paling merusak ditunjukkan oleh meningkatnya penyebaran berita palsu atau disinformasi dan rekayasa sosial yang melemahkan kualitas informasi serta mendorong munculnya konflik sosial dan dinamika politik yang tegang (Bahram, 2023). Menurut Nasionalita dan Nugroho, terdapat dua persoalan utama yang muncul akibat derasnya aliran data: pertama, kondisi kelebihan informasi yang membuat seseorang mudah terseret ke dalam apa yang mereka sebut sebagai cyberswamp – sebuah keadaan ketika ruang digital begitu padat dan keruh; kedua, tingginya kemudahan dalam memproduksi konten secara sengaja sebagai komoditas, yang pada akhirnya memicu lahirnya disinformasi.

Mengingat dampak destruktif hoaks – mulai dari kepanikan, ketidakpercayaan, hingga memicu tindakan merugikan (Februari et al., 2024) – maka penguatan kemampuan membedakan informasi benar dan hoaks menjadi sangat mendesak. Pada 2021, pemerintah melalui Kominfo melakukan upaya pencegahan dengan meluncurkan program literasi digital yang berfokus pada empat aspek utama – etika digital, masyarakat digital, keterampilan digital, serta budaya digital – yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan secara luas (Raharjo & Winarko, 2021). Namun, tantangan disinformasi dan polarisasi opini publik masih memerlukan kompetensi yang lebih strategis. Artikel ini mengkaji bahwa keterampilan komunikasi sosial merupakan kompetensi strategis yang fundamental untuk membangun dialog sehat, menyaring

informasi secara kritis, dan mendorong interaksi inklusif, sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan masyarakat digital. Menganalisis urgensi peningkatan literasi digital, khususnya di aspek keamanan, sebagai dasar bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Mengidentifikasi dan mengelaborasi tantangan krusial yang ditimbulkan oleh disinformasi, hoaks, dan cyberswamp terhadap kualitas wacana publik. Mengkonseptualisasikan peran penguatan keterampilan komunikasi sosial (meliputi literasi media, empati digital, dan kohesi sosial) sebagai solusi strategis untuk menghadapi dinamika disinformasi dan polarisasi di ruang digital Indonesia.

Perkembangan era digital yang kian pesat membuat informasi dapat dijangkau dengan sangat mudah melalui beragam platform, dan kondisi ini menimbulkan pengaruh ganda bagi masyarakat, khususnya kalangan muda. Arus data yang beredar di media sosial, situs berita daring, maupun aplikasi perpesanan tidak hanya memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru berupa maraknya konten menyesatkan atau hoaks. Situasi ini telah berubah menjadi isu global yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, politik, ekonomi, hingga dinamika sosial budaya (Nugroho & Putri, 2020). Artikel ini menggunakan metode penelitian konseptual melalui kajian literatur. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis teoritis, sintesis dari temuan-temuan dan konsep-konsep yang telah ada, serta perumusan model konseptual baru. Proses pengumpulan data dilakukan dengan meninjau secara mendalam berbagai sumber, mencakup artikel ilmiah, hasil survei dari lembaga seperti Kominfo dan KIC, serta literatur relevan yang membahas literasi digital, disinformasi, dan komunikasi sosial.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini membahas urgensi literasi digital di kalangan pemuda, komponen-komponen utama literasi digital, perbedaan antara misinformasi dan disinformasi, serta strategi komprehensif untuk memerangi penyebaran informasi palsu di era digital.

Konsep dan Urgensi Literasi Digital

Keterampilan literasi digital menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki di era modern, menuntut individu untuk memiliki perilaku kritis dan inspiratif sebagai kompetensi digital, serta kompetensi yang baik dalam penggunaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). Peningkatan literasi digital sangat penting, terutama di lingkungan pemuda, untuk menjembatani perbedaan digital dan memfasilitasi keterlibatan dengan dukungan perangkat digital yang memungkinkan terciptanya peluang usaha dan peningkatan kemampuan individu.

Literasi digital membekali generasi muda dengan kemampuan guna memahami lingkungan digital dan mengidentifikasi perbedaan antara konten hiburan dan konten pembelajaran. Meskipun studi menunjukkan generasi muda umumnya mempunyai kemampuan dasar TIK, terdapat kesenjangan kontribusi penting terhadap kemampuan mereka dalam memproduksi aneka konten digital (Sutrisna, 2020)

Keterampilan dan Prinsip Dasar

Menurut Alkalai, literasi digital secara umum mencakup lima keterampilan utama:

1. Literasi Visual Foto: Kemampuan membaca dan menyimpulkan informasi dari gambar atau foto.
2. Literasi Reproduksi: Literasi reproduktif merujuk pada kemampuan individu dalam menghasilkan kembali atau menciptakan bentuk konten baru dengan memanfaatkan perangkat dan teknologi digital. Kompetensi ini mencakup proses adaptasi, modifikasi, hingga produksi karya digital yang orisinal berdasarkan pemahaman dan kreativitas pengguna.
3. Navigasi Linier / Information Literacy: Information literacy atau navigasi linier merupakan keterampilan esensial yang mencakup kemampuan untuk mencari, mengidentifikasi, mengakses, serta mengevaluasi informasi secara kritis di lingkungan digital. Kemampuan ini menuntut individu untuk menilai kredibilitas sumber, memverifikasi keakuratan data, serta memahami konteks informasi yang diperoleh melalui internet.
4. Literasi Sosial-Emosional: Literasi sosial-emosional berkaitan dengan kecakapan individu dalam mengelola interaksi, komunikasi, dan ekspresi diri di ruang digital. Aspek ini tidak hanya mencakup kemampuan untuk berkolaborasi dan berpartisipasi dalam jejaring sosial, tetapi juga pemahaman terhadap dinamika emosional ketika memproduksi, membagikan, ataupun mengonsumsi konten digital.

Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sebagaimana dirangkum) menetapkan empat prinsip dasar pengembangan literasi digital:

1. Pemahaman: Berkaitan dengan kemampuan menyaring dan mampu menangkap makna eksplisit maupun implisit dari informasi yang disajikan melalui berbagai media, serta menyaringnya dari berbagai perspektif.
2. Saling Ketergantungan: Pengertian bagaimana suatu bentuk media saling melengkapi satu sama lain, mengingat banyaknya keragaman platform media yang tersedia.
3. Komponen Sosial: Media berfungsi menyampaikan informasi serta mendistribusikan pesan kepada publik. Keberhasilan penyampaian pesan dipengaruhi oleh siapa yang menjadi sumber informasi, kepada pihak mana informasi tersebut ditujukan, dan melalui saluran apa pesan itu disampaikan.
4. Kurasi: Kemampuan masyarakat untuk mengakses, menyimpan informasi dalam jangka panjang, serta bekerja sama untuk menelusuri, mengidentifikasi, dan menyusun informasi yang relevan dan berguna.

5.

Klasifikasi Informasi Palsu: Misinformasi vs. Disinformasi

Penting untuk membedakan antara dua jenis berita yang tidak sesuai fakta:

Istilah	Definisi	Motivasi Penyebar
---------	----------	-------------------

Misinformasi	Informasi yang keliru, tetapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa itu benar.	Disebarkan karena kesalahan atau ketidaktahuan fakta terbaru, tanpa maksud untuk menyesatkan.
Disinformasi	Informasi yang keliru, dan orang yang menyebarkannya tahu bahwa itu salah, tetapi tetap menyebarkannya.	Kebohongan yang disengaja dan secara aktif diinformasikan oleh aktor jahat untuk tujuan menyesatkan dan membingungkan publik (Nurjanah et al., 2023).

Berbagai kategori disinformasi, misinformasi, dan hoaks yang teridentifikasi meliputi: Satire atau parodi, koneksi yang salah, konten yang menyesatkan, konten yang salah, konten tiruan, konten yang dimanipulasi, dan konten palsu. Sementara itu, hoaks juga dapat berbentuk Manipulasi Foto, Manipulasi Video, Manipulasi Berita, Manipulasi Penilaian Ahli, dan Manipulasi dengan Data.

Strategi Penanggulangan Hoaks dan Disinformasi

Penyebaran hoaks dan disinformasi telah menjelma menjadi masalah kritis yang perlu mendapat perhatian, mengganggu stabilitas sosial dan merusak kepercayaan publik di era digital. Penanggulangan hambatan ini memerlukan Tahapan strategis dan kolaborasi dari banyak pihak:

1. **Pemahaman dan Edukasi Publik:** Melibatkan Lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan berbagai komunitas berperan sebagai ujung tombak dalam menanamkan kemampuan literasi digital, khususnya dalam mengenali informasi yang kredibel dan memilahnya dari konten yang menyesatkan.
2. **Regulasi dan Kebijakan:** Pemerintah harus menetapkan regulasi yang tegas, Upaya penegakan aturan juga mencakup pemberian konsekuensi hukum bagi individu atau pihak yang dengan sengaja menyebarluaskan informasi tidak benar. Selain itu, sinergi antara pemerintah dan penyedia layanan media sosial menjadi penting untuk mendeteksi serta menurunkan konten yang mengandung misinformasi.
3. **Peran Lembaga Media dan Praktik Jurnalisme Profesional:** Institusi media massa bertanggung jawab menyampaikan data dan pemberitaan yang dapat dipercaya, bersifat netral, serta didasarkan pada verifikasi yang kuat. *Fact-checking* menjadi begitu krusial, dan jurnalis perlu dilatih untuk menelusuri dan menentukan asal informasi yang dapat dipercaya
4. **Kontribusi Masyarakat:** Setiap individu dituntut bertanggung jawab untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan materi yang dianggap meragukan kepada otoritas terkait berperan penting dalam menekan peredaran informasi palsu.
5. **Sistem verifikasi informasi:** Pemanfaatan kecerdasan buatan dan teknik pengolahan data dapat meningkatkan efektivitas identifikasi dan

penangkalan hoaks. Media digital didorong untuk membangun algoritma yang dapat mengidentifikasi jejak dan pola distribusi informasi tidak benar dan memberikan peringatan kepada pengguna.

Pada akhirnya, literasi digital bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan inovasi secara bertanggung jawab, memiliki kemampuan untuk menemukan, menimbang kualitas, mengolah, dan memproduksi informasi secara bertanggung jawab, serta mematuhi konsekuensi hukum, merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam situasi di mana informasi mengalir sangat cepat dan hadir dalam berbagai bentuk, setiap orang perlu memiliki kecakapan yang kuat untuk memilah, memahami, serta memanfaatkan informasi secara benar dan bijaksana. Demikian pula dengan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam ranah digital, termasuk penggunaan media sosial, email, dan platform komunikasi lainnya, yang semakin menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis terkait untuk mengetahui Bagaimana kemampuan siswa dalam menggunakan literasi informasi dan komunikasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan komunikasi dicirikan sebagai kapasitas individu untuk mengartikulasikan konsep, gagasan, dan informasi kepada orang lain dengan cara yang jernih dan tepat. Sebaliknya, komunikasi sosial berkaitan dengan proses komunikatif yang diarahkan ke keterlibatan sosial yang lebih luas dalam masyarakat.

Menurut Putri (2023) merujuk definisi yang diberikan oleh Mulyana dan Hilmawan (2021), yang menegaskan bahwa “Komunikasi sosial adalah interaksi di mana seseorang menyampaikan kepercayaannya kepada pihak lain, untuk memahami dan menangkap maknanya.” Keterampilan komunikasi sosial menunjukkan kemahiran individu untuk berinteraksi dan bertukar informasi secara mahir dengan orang lain di berbagai pengaturan sosial. Literasi media dan literasi informasi terkait erat dengan keterampilan komunikasi sosial. Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa literasi media tidak hanya memberdayakan individu untuk mengadopsi sikap kritis terhadap informasi tetapi juga meningkatkan kemampuan komunikasi sosial mereka. Individu yang memiliki literasi media yang kuat umumnya lebih mahir menyampaikan pesan dengan cara yang efektif dan persuasif dan diperlengkapi untuk membedakan dan terlibat dengan konten digital dengan bijaksana. Akibatnya, memahami mekanisme media massa dan media sosial merupakan aspek penting dari keterampilan komunikasi sosial kontemporer, sehingga memungkinkan pengguna untuk terlibat secara serius dalam wacana publik.

Definisi literasi: literasi komunikasi dan literasi digital

1. Literasi Digital (LD): Fokus pada Keterampilan Kognitif dan Teknis

UNESCO (dikutip dalam banyak artikel): Mendefinisikan LD sebagai kecakapan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menelusuri, mengelola, memahami, mengintegrasikan, menganalisis dan menciptakan informasi secara aman dan tepat." Fokusnya sangat kuat pada aspek teknis dan manajemen informasi di ruang digital.

Gilster, P. (1997) dan Martin, A. (2008): Martin (dikutip dalam jurnal Literasi Digital, 2025) merumuskan LD sebagai kombinasi dari berbagai jenis literasi, seperti literasi informasi, komputer, visual, dan komunikasi tetapi penekanannya tetap pada kemampuan memanfaatkan perangkat digital secara benar untuk memperoleh, mengatur, dan menilai informasi. Buckingham, D. (2015): LD merujuk pada kecakapan memakai media secara efisien agar individu dapat menemukan lokasi dan jenis informasi yang tepat (Literasi Media dan Digital di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sistematis, 2019). Ini menekankan pada output media itu sendiri.

2. Literasi Komunikasi (LK): Fokus pada Niat dan Etika

Faktor Sosial dan Etika Digital: Meskipun sebagian LD sudah memasukkan unsur etika, konsep LK menekankan bahwa "Faktor sosial" dalam komunikasi digital (yaitu, keberhasilan jangka cakupan media bergantung pada karakteristik pengirim pesan maupun audiensnya.) harus dipandang sebagai kompetensi utama, bukan sekadar pelengkap teknis. Sumber Pendukung: Artikel Tantangan dan Solusi dalam Etika Komunikasi di Era Digital (2025) menekankan perlunya memasukkan kurikulum etika digital dan prinsip-prinsip seperti "Menghormati Privasi dan Hak Orang Lain" dalam komunikasi digital. Literasi Komunikasi sebagai Aksi Intervensi: Literasi Komunikasi tidak hanya berhenti pada memfilter informasi untuk diri sendiri (LD), tetapi menuntut tindakan komunikatif untuk mengurangi disinformasi di lingkungan sosial. Sumber Pendukung: Azwar (2022) dalam Tindakan Komunikatif Komunitas Virtual untuk Mengurangi Disinformasi menunjukkan bagaimana komunikasi (aksi dan narasi) adalah solusi aktif, yang melampaui kemampuan teknis digital. Fokus pada Niat (Intention): Literasi Komunikasi lebih mengacu pada kemampuan kritis untuk menjawab: "Mengapa orang lain (penyebarkan disinformasi) ingin menipu?" dan "Mengapa saya mau menyebarkan pesan ini?" . Ini adalah kompetensi di tingkat retorika dan niat komunikator.

Tantangan Komunikasi di Era Digital di Indonesia: Disinformasi

Disinformasi sering bermanifestasi sebagai berita palsu yang disebarluaskan secara luas melalui platform media sosial. Studi empiris dan laporan analitis mengungkapkan bahwa proliferasi hoaks yang luas, sebagian, merupakan konsekuensi dari literasi media yang relatif tidak memadai di kalangan masyarakat. Indonesia menghadapi hambatan yang signifikan dalam bidang komunikasi publik, terutama disebabkan oleh isu-isu disinformasi (hoaks) yang meresap dan polarisasi opini publik,

Menurut Bulya & Izzati (2024) menemukan bahwa sementara indeks literasi digital Indonesia berada pada lintasan naik, eskalasi hoaks terus berlanjut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan perbedaan antara kompetensi teknologi dan pemahaman etika digital, sehingga membuat banyak individu rentan terhadap informasi yang menyesatkan. Disinformasi yang dihasilkan dan disebarkan oleh entitas tertentu memiliki kapasitas untuk memecah kohesi masyarakat, terutama ketika itu terkait dengan masalah identitas atau afiliasi politik. Di Indonesia, fenomena ini sangat menonjol, sebagaimana dibuktikan dengan seringnya terjadinya tagar politik; dialog online sering sangat terpolarisasi sehingga sebagian besar mencerminkan perspektif tunggal tentang masalah tersebut. Situasi ini menghalangi perkembangan wacana inklusif dan kritis, karena menjadi semakin sulit untuk memfasilitasi dialog di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Disinformasi yang banyak beredar melalui media internet merupakan fenomena sosial yang harus diwaspadai. Tom Buchanan dalam studi terbarunya mengungkap faktor penyebab terjadi distribusi disinformasi ini. Perkembangan teknologi digital selain bermanfaat untuk mendukung interaksi manusia, juga menghadirkan fenomena sosial berupa informasi yang tidak akurat semakin mudah beredar pada era digital karena siapa pun dapat membuat dan membagikan konten tanpa batasan. Akibatnya, penyebaran berita palsu, disinformasi, maupun hoaks terus meningkat. Dalam publikasi *Journalism, Fake News & Disinformation: Handbook for Journalism Education and Training* yang dirilis UNESCO (2018), disinformasi disebut sebagai salah satu dari tiga kategori informasi keliru, bersama dengan misinformasi dan malinformasi.

Salah satu contoh kasus yang dipicu oleh disinformasi adalah peristiwa penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur, pada 27 Agustus 2020. Kejadian tersebut berawal dari beredarnya informasi yang salah sehingga memicu kemarahan sekelompok orang (Kompas, 29/8/2020). Insiden ini menunjukkan dampak serius yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran informasi menyesatkan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apa yang membuat seseorang terdorong untuk membagikan informasi keliru, terutama di ruang digital? Pertanyaan tersebut menjadi fokus penelitian Tom Buchanan dalam artikelnya berjudul *Why Do People Spread False Information Online?* yang diterbitkan pada September 2020. Dalam tulisan tersebut, Buchanan mengulas bagaimana karakter pesan dan tipe audiens tertentu memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menyebarkan disinformasi melalui media sosial.

Disinformasi dapat didefinisikan sebagai informasi yang sengaja dibuat atau disebarluaskan untuk menyesatkan audiens. Dalam konteks Indonesia, keragaman etnis, agama, dan budaya menjadi titik lemah yang dapat dieksploitasi melalui narasi yang memecah belah masyarakat (Yusuf & Rahmat, 2023). Strategi disinformasi sering memanfaatkan media sosial sebagai medium utama karena jangkauan dan kecepatannya yang luar biasa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia, menjadikannya target potensial dari kampanye disinformasi global. Kerentanan terhadap disinformasi juga diperburuk oleh tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap institusi pemerintahan yang menurun. Ketidakpercayaan ini sering kali dimanfaatkan oleh aktor yang ingin melemahkan legitimasi pemerintah melalui narasi yang menciptakan ketidakstabilan (Simanjuntak, 2023).

IV. KESIMPULAN

Ancaman disinformasi dan hoaks saat ini merupakan tantangan serius bagi tatanan sosial dan demokrasi di Indonesia, terutama di kalangan pelajar (Generasi Z) yang rentan akibat rendahnya literasi digital, khususnya dalam aspek keamanan. Proliferasi informasi palsu dan rekayasa sosial merusak integritas informasi, memicu ketegangan politik, dan menghalangi partisipasi publik yang sehat dalam proses demokrasi. Kondisi ini diperburuk oleh fenomena information overload dan cyberswamp, serta tindakan aktor jahat yang sengaja menjadikan konten palsu sebagai komoditas untuk tujuan memecah belah. Mengingat dampak destruktif dari hoaks—mulai dari kepanikan hingga tindakan merugikan—penguatan kemampuan membedakan informasi benar dan palsu menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Teks ini berargumen bahwa penanggulangan tantangan disinformasi tidak cukup hanya dengan meningkatkan Literasi Digital (LD) yang berfokus pada kemampuan teknis. Solusi strategis yang diusulkan adalah penguatan Keterampilan Komunikasi Sosial (KKS) dan Literasi Komunikasi (LK). Berbeda dengan LD yang fokus pada manajemen informasi, LK menekankan pada niat (intention), etika, dan faktor sosial dalam interaksi digital. LK menuntut individu untuk melakukan aksi intervensi komunikatif guna mengurangi disinformasi di lingkungan sosial, dengan memicu pertanyaan kritis tentang motif penyebar dan etika diri sendiri dalam menyebarkan pesan. KKS, yang mencakup literasi media, empati digital (implisit dalam etika), dan kohesi sosial, berfungsi sebagai kerangka dasar untuk membangun masyarakat digital yang tangguh. Dengan menguasai KKS, masyarakat tidak hanya mampu menyaring informasi secara kritis, tetapi juga mampu membangun dialog sehat dan mendorong interaksi inklusif, yang sangat penting untuk melawan polarisasi opini publik yang kian meruncing di Indonesia. Pada akhirnya, strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi digital di Indonesia dapat secara bertanggung jawab mendukung wacana publik yang sehat dan memperkuat kualitas demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Besariani, K. C., Zahira, R. G., & Pandin, M. G. R. 2022. "Pengaruh Etika Dan Moral Remaja Terhadap Lunturnya Literasi Di Era Digital."
- Bulya, B., & Izzati, S. (2024). *Indonesia's Digital Literacy as a Challenge for Democracy in the Digital Age. The Journal of Society and Media*, 8(2), 640-661. journal.unesa.ac.id/journal.unesa.ac.id.
- Detikinet, Tim. 2023. "Awat! Ada Hoax Menag Disebut Mau Ganti Salat Jumat Ke Sabtu." *Inet.Detik.Com*. 2023
- Faturahman, R., Azahra, N., Perdika, A. T., Akmal, F. M., Kamila, N. R., & Khoirotun, P. (2024). *Polarisasi sebagai bentuk efek negatif dalam pembentukan opini publik pada Pemilihan Presiden 2019. Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(1), 99-115. journal.uinjkt.ac.id/journal.uinjkt.ac.id.

- Hastuti, A. (2023). *Strategi Informasi dalam Menghadapi Ancaman Disinformasi*. Yogyakarta: Pustaka Mandiri.
- Hidayat, B. (2022). *Teknologi dan Disinformasi: Tantangan di Era Digital*. Bandung: ITB Press.
- Hobbs, R., & Coiro, J. (2023). "Integrating Digital Literacy in Education Systems." *Education and Information Technologies*.
- Irwan, A. I. U. (2024). Empathy as a tool: *Analyzing the spread of disinformation in the 2019 Indonesian election. Safeguarding Democracy: Multifaceted Responses to Election Disinformation* (Working Paper).
- Lukman Hakim, Lusi Nisa'ul Aina. 2022. "Analisis Semiotika Video Klip BTS 'Permission to Dance.'" *Journal Komunikasi Islam* 3 (2): 1–21.
- Mahameruaji, Jimi Narotama, Lilis Puspitasari, Evi Rosfiantika, and Detta Rahmawan. 2018. "Bisnis Vlogging Dalam Industri Media Digital Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 15 (1): 61–74. <https://doi.org/10.24002/jik.v15i1.1007>.
- Mardina, Riana. 2017. "Literasi Digital Bagi Generasi Digital Natives." *Seminar Nasional Perpustakaan & Pustakawan Inovatif Kreatif Di Era Digital*, no. May 2017: 340–52.
- Martianto, Raden Wahyu Utomo, and Ahmad Toni. 2021. "Analisis Semiotika Gaya Komunikasi Milenial Bambang Soesatyo Melalui Youtube Podcast." *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4 (1): 13–28. <https://doi.org/10.33822/jep.v4i1.2351>.
- Sari, R. P., Sabur, A. J., & Azzahra, N. (2022). *Pendampingan gerakan literasi media pada calon profesional muda melalui webinar dan online campaign challenge "Yuk, Berbahasa Baik"*. *Indonesian Community Service and Empowerment Journal*, 3(1).
- Susanto, A., Perwita Sari, M., & Purwantiningrum, H. (2022). *Edukasi tentang literasi media untuk mencegah disinformasi di masa pandemi COVID-19*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)*, 2(3) abdira.org.